

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1.1.1 Latar Belakang APEC



Gambar 1.1

*APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)*

*Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dibentuk pada tahun 1989 sebagai forum ekonomi regional untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Dengan keanggotaan dari 21 ekonomi, organisasi ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman. Fokus utama APEC adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi, mempercepat integrasi ekonomi, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sebagai forum ekonomi, APEC mempermudah pergerakan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja antarnegara anggota. Untuk mencapai hal ini, APEC berupaya menyederhanakan prosedur bea cukai di perbatasan, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, serta menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh wilayah. Salah satu inisiatif APEC adalah harmonisasi sistem regulasi agar produk yang diperdagangkan di berbagai ekonomi anggota dapat mengikuti satu standar yang seragam, sehingga proses ekspor dan impor menjadi lebih mudah.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, APEC juga berupaya memastikan bahwa semua masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi. Program-program APEC dirancang untuk

meningkatkan keterampilan digital masyarakat pedesaan, memberdayakan perempuan pengusaha, serta mendukung efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Forum ini terus disesuaikan untuk menghadapi tantangan seperti ketahanan bencana, perencanaan pandemi, dan penanggulangan terorisme guna menjaga stabilitas ekonomi regional.

### **1.1.2 Tujuan dan Prinsip APEC**

Sebagai forum kerja sama ekonomi dan perdagangan multilateral, APEC beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama dan konsensus. Keputusan dalam APEC dibuat melalui dialog terbuka dengan menghormati pandangan semua anggota. Tidak ada komitmen yang bersifat mengikat, dan tidak terdapat kewajiban perjanjian yang harus dipenuhi oleh anggota. Sebaliknya, setiap komitmen dalam APEC dilakukan secara sukarela, dan proyek peningkatan kapasitas membantu anggota dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif yang telah disepakati.

Struktur organisasi APEC mengadopsi pendekatan “*bottom-up*” dan “*top-down*”, di mana empat komite inti dan kelompok kerja bertugas merumuskan kebijakan strategis yang kemudian ditetapkan oleh para pemimpin dan menteri APEC. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui proyek-proyek yang didanai APEC, dengan anggota dapat mengambil tindakan kolektif atau individu untuk mendukung pelaksanaannya melalui program peningkatan kapasitas.

Pengelolaan proyek-proyek APEC dilakukan oleh APEC Project Management Unit, yang bekerja sama dengan kelompok kerja untuk memastikan efektivitas implementasi program. Pendanaan untuk proyek-proyek ini berasal dari kontribusi anggota APEC. Selain itu, APEC Policy Support Unit bertanggung jawab dalam melakukan riset kebijakan, analisis, serta evaluasi guna mendukung pelaksanaan agenda APEC. Untuk memastikan kelangsungan operasionalnya, APEC memiliki sekretariat permanen yang berbasis di Singapura, yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan koordinasi bagi seluruh kegiatan organisasi.

### **1.1.3 Struktur dan Keanggotaan APEC**

Keanggotaan APEC meliputi:

Tabel 1.1

Keanggotaan APEC dan Tanggal Bergabung

No	Anggota APEC	Tanggal Bergabung
1	Australia	6-7 November 1989
2	Brunei Darussalam	6-7 November 1989
3	Kanada	6-7 November 1989
4	Chili	11-12 November 1994
5	Republik Rakyat Tiongkok	12-14 November 1991
6	Hong Kong, Tiongkok	12-14 November 1991
7	Indonesia	6-7 November 1989
8	Jepang	6-7 November 1989
9	Republik Korea	6-7 November 1989
10	Malaysia	6-7 November 1989
11	Meksiko	17-19 November 1993
12	Selandia Baru	6-7 November 1989
13	Papua Nugini	17-19 November 1993
14	Peru	14-15 November 1998
15	Filipina	6-7 November 1989
16	Rusia	14-15 November 1998
17	Singapura	6-7 November 1989
18	Tionghoa Taipei	12-14 November 1991
19	Thailand	6-7 November 1989
20	Amerika Serikat	6-7 November 1989
21	Vietnam	14-15 November 1998

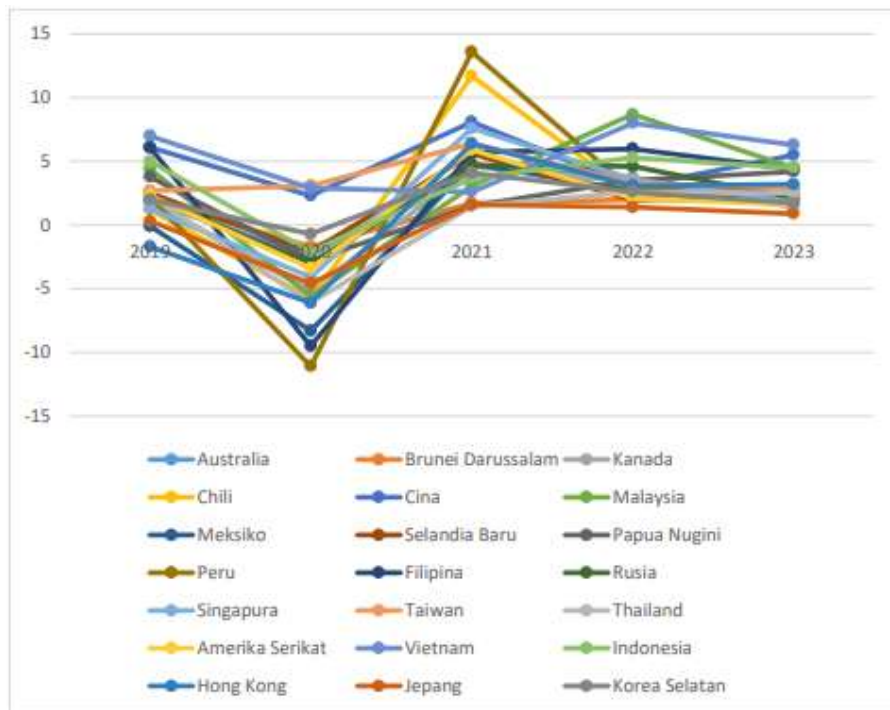
Sebagian besar negara anggota APEC bergabung pada 6-7 November 1989, yaitu 11 negara, termasuk Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Negara lainnya bergabung pada beberapa tanggal setelah itu, seperti 12-14 November 1991 (Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Tiongkok, dan Tionghoa Taipei), 17-19 November 1993 (Meksiko dan Papua Nugini), dan 14-15 November 1998 (Peru, Rusia, dan Vietnam).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Negara-negara di kawasan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) mengalami berbagai dinamika ekonomi yang signifikan. Inflasi, sebagai salah satu indikator utama ekonomi, telah menjadi isu yang kerap menciptakan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara anggota APEC. Negara seperti Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Peru, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Hong kong, Rusia, Amerika Serikat, Australia, Chili, Korea Selatan, Kanada, Jepang, Meksiko, Taiwan, Cina, Vietnam, dan Selandia Baru merupakan 21 negara dari anggota APEC. Hiperinflasi cenderung berpengaruh pada kemampuan beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan investasi, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi (Meiditambua et al., 2023). Selain itu, Realisasi Investasi Asing Langsung (FDI) yang tidak merata di setiap sektor serta dampak pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan realisasi FDI, sementara minat investor asing dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur listrik dan kualitas tenaga kerja (Nindry et al., 2024). Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Meksiko, misalnya, beberapa kali mengalami lonjakan inflasi akibat fluktuasi harga komoditas global, terutama minyak mentah dan produk pertanian (Safitri & Daryono, 2021).

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan panjang di kalangan ekonom. Di satu sisi, tingkat inflasi yang moderat dianggap dapat menstimulasi perekonomian karena menciptakan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi (Sabyan et al., 2023). Namun, ketika inflasi melebihi ambang batas yang sehat, dampaknya bisa sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang tidak terkendali berdampak buruk pada perekonomian dengan menekan

investasi dan merusak kepercayaan pelaku bisnis, sehingga mempengaruhi produktivitas ekonomi jangka panjang (Anggraini & Putri, 2020). Di beberapa negara APEC, banyak negara menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan menstimulasi perekonomian yang berkelanjutan.



Gambar 1.2

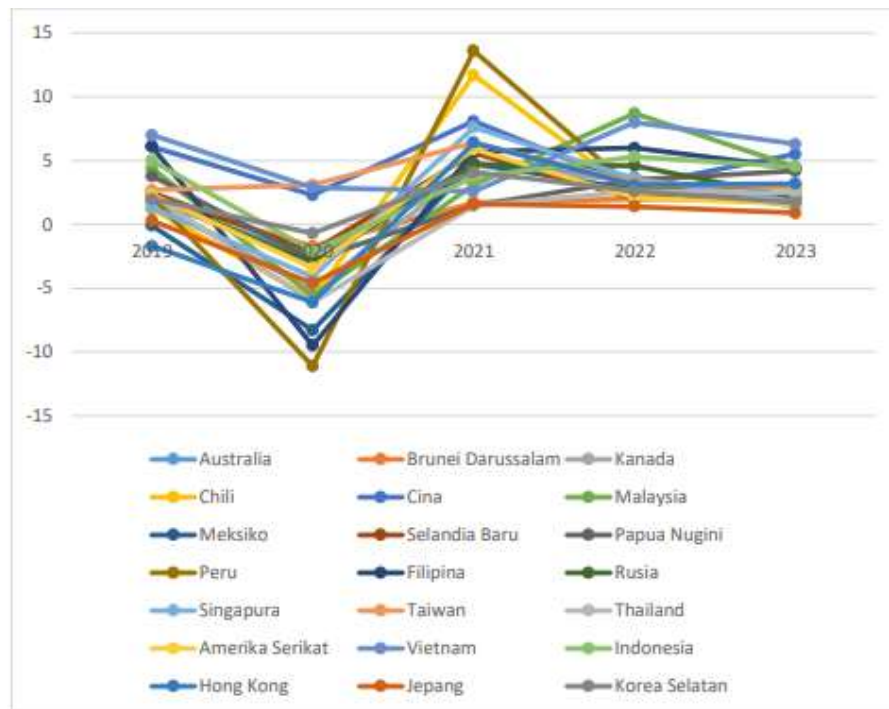
Perkembangan Inflasi di Negara APEC Periode 2019-2023

*Sumber:* Trading Economics (2024)

Gambar 1.1 di atas, menunjukkan grafik perkembangan inflasi di negara-negara APEC periode 2019-2023. Pada gambar ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2022 di mana inflasi mencapai puncaknya di sebagian besar negara. Lonjakan inflasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor global, seperti dampak pandemi COVID-19 yang memicu gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik yang meningkatkan harga energi dan komoditas. Sebagai contoh, Rusia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2022, yang sebagian besar disebabkan oleh sanksi ekonomi global dan kenaikan harga minyak akibat konflik Rusia-Ukraina (Hutabarat, 2022). Secara

umum, negara-negara yang sangat bergantung pada impor dan energi, seperti Meksiko, Filipina, dan Amerika Serikat, juga menunjukkan peningkatan inflasi yang cukup tajam pada periode yang sama.

Setelah puncak inflasi tahun 2022, proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan penurunan inflasi di sebagian besar negara, seiring dengan upaya masing-masing pemerintah dan bank sentral dalam mengendalikan harga melalui kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti kenaikan suku bunga (Septiani et al., 2024). Namun, meskipun ada penurunan, tingkat inflasi di banyak negara masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dari krisis global membutuhkan waktu dan stabilitas yang lebih panjang. Tren ini juga mengindikasikan perlunya adaptasi dan kebijakan ekonomi yang lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, kondisi krisis ekonomi dapat melemahkan minat investasi para investor (Waspada & Salim, 2020).



Gambar 1.3

Pertumbuhan Ekonomi di Negara APEC Periode 2019-2023

*Sumber:* Trading Economics (2024)

Gambar 1.2 di atas menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi di negara-negara APEC periode 2019-2023. Pada gambar ini menunjukkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana sebagian besar negara mengalami kontraksi ekonomi yang tajam. Negara-negara seperti Peru, Chili, dan Filipina mengalami penurunan yang sangat drastis, sedangkan negara-negara dengan ekonomi lebih stabil seperti China dan Vietnam menunjukkan performa yang lebih baik meskipun tetap terdampak. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas, penutupan bisnis, dan gangguan pada rantai pasokan global (Su et al., 2019). Namun, pada tahun 2021, mayoritas negara mengalami pemulihan ekonomi yang signifikan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, berkat pelonggaran pembatasan dan program stimulus ekonomi yang diterapkan di berbagai negara APEC.

Di tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada pada fase pemulihan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pemulihan pasca-pandemi, ekonomi sebagian besar negara telah kembali ke pola pertumbuhan yang lebih moderat. Beberapa negara seperti Vietnam dan China masih menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, menandakan ketahanan ekonomi dan daya saing yang kuat di wilayah tersebut. Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi tantangan struktural, termasuk perubahan demografi dan kebutuhan akan transformasi digital yang lebih lanjut (Raghavan et al., 2021). Grafik ini mencerminkan bagaimana negara-negara APEC sedang menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di era pasca-pandemi, dengan fokus pada stabilisasi dan keberlanjutan pertumbuhan.

Menurut laporan dari APEC, tingginya biaya hidup akibat inflasi berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diproyeksikan mencapai 3,1 persen pada tahun 2023 menjadi 2,8 persen pada tahun 2024 (Bisnis.com, 2023). Selain inflasi, kondisi fiskal yang menurun dan lonjakan utang akibat stimulus besar-besaran selama pandemi Covid-19 turut mempersempit ruang gerak ekonomi di kawasan ini. APEC mencatat bahwa tingkat pendapatan di sebagian besar negara

anggotanya belum pulih ke level prapandemi, sehingga memperlebar kesenjangan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Di sisi lain, tekanan perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekonomi kawasan turut menjadi sorotan penting. Selama bertahun-tahun, negara-negara APEC telah menghadapi dampak bencana alam yang intensitasnya semakin tinggi. APEC memperkirakan bahwa tanpa aksi nyata untuk mitigasi dan adaptasi, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat mencapai 7,3 persen dari PDB pada tahun 2100 (Kompas.com, 2022). Untuk menghadapi tantangan ini, APEC mendorong percepatan transformasi digital dan penguatan kerja sama internasional guna menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Di tengah tantangan global seperti krisis energi, pangan, dan inflasi, kawasan Asia Pasifik berupaya mempercepat reformasi struktural serta menggalakkan kolaborasi dalam teknologi dan digitalisasi demi memperkuat daya saing, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di kawasan ini.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator ekonomi yang sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi, terutama di kawasan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang terdiri dari negara-negara dengan karakteristik ekonomi berbeda. Inflasi yang tinggi biasanya berdampak negatif pada daya beli masyarakat, biaya produksi, dan daya saing produk di pasar internasional, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, inflasi yang moderat atau terkendali sering dianggap sebagai tanda ekonomi yang berkembang, karena menunjukkan adanya permintaan yang cukup tinggi terhadap barang dan jasa. Namun, ketika inflasi melebihi ambang batas tertentu, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berubah drastis menjadi negatif, menekan daya beli dan investasi, serta meningkatkan ketidakpastian dalam perekonomian (Putri & Fadilla, 2023).

Tantangan besar bagi negara-negara APEC adalah menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketika inflasi melonjak, bank sentral di negara-negara ini biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan agregat. Namun, kebijakan ini juga dapat menghambat investasi dan ekspansi bisnis, yang



pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara APEC yang memiliki struktur ekonomi yang lebih rentan, seperti Filipina dan Peru, kebijakan pengetatan moneter sering kali berdampak negatif pada investasi dan konsumsi. Di sisi lain, negara dengan ekonomi yang lebih kuat, seperti Amerika Serikat dan Jepang, memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menangani inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi terlalu signifikan (Navarro, 2020).

Selain itu, inflasi juga mempengaruhi stabilitas harga dan nilai tukar mata uang di negara-negara APEC, yang berdampak pada perdagangan internasional. Negara-negara seperti China dan Vietnam, yang sangat bergantung pada ekspor, merasakan dampak langsung ketika inflasi domestik yang tinggi membuat produk mereka kurang kompetitif di pasar global (Tien et al., 2019). Ketika inflasi meningkat, mata uang domestik biasanya melemah, yang dapat menguntungkan ekspor namun juga meningkatkan biaya impor, menciptakan tekanan ganda bagi negara yang bergantung pada bahan baku impor. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi negara-negara APEC dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing internasional di tengah inflasi global yang fluktuatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik & Saragih (2023) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara ASEAN selama periode 2017-2021. Penelitian oleh Syafi'i et al. (2021) juga menunjukkan bahwa inflasi dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Razia et al. (2023) menunjukkan bahwa cara-cara menstabilkan inflasi yaitu melalui mekanisme pengendalian harga yang efektif untuk meningkatkan kondisi makroekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang untuk pemanfaatan penuh sumber daya manusia, terutama dengan mendorong kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan populasi, terutama di kalangan pemuda, untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan data dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengkonfirmasi gap hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini mengambil tema **“Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di**

**Negara APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*)”**. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat inflasi merupakan faktor ekonomi yang signifikan dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota APEC. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih efektif di kawasan APEC, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah inflasi, yang merupakan kondisi ekonomi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu (Orphanides & Solow, 1990). Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, sementara inflasi yang moderat dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi (Sabyan et al., 2023). Di negara-negara APEC, tingkat inflasi bervariasi secara signifikan akibat perbedaan struktur ekonomi, kebijakan moneter, dan volatilitas harga komoditas global (Hutabarat, 2022).

Selain inflasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. PMTB mencerminkan investasi dalam aset tetap, seperti infrastruktur dan peralatan industri, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu negara (Prasetyo & Bachtiar, 2024). Peningkatan investasi dalam PMTB berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta daya saing ekonomi secara keseluruhan (Suhada et al., 2022). Namun, realisasi investasi yang tidak merata serta faktor eksternal, seperti ketidakpastian geopolitik dan kondisi pasar global, dapat mempengaruhi efektivitas PMTB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara APEC.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah, yang mencerminkan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi (Mahzalena & Juliansyah, 2019). Berdasarkan teori Wagner, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor-sektor strategis,

seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi masyarakat serta daya saing tenaga kerja (Nahumuri, 2019). Namun, lonjakan utang akibat stimulus ekonomi selama pandemi COVID-19 turut membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Bisnis.com, 2023). Selain faktor domestik, keterbukaan perdagangan juga menjadi variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-negara APEC merupakan bagian dari salah satu kawasan perdagangan internasional terbesar di dunia, di mana keterbukaan perdagangan diukur melalui perbandingan antara ekspor dan impor dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Ichvani & Sasana, 2019). Negara dengan tingkat keterbukaan perdagangan yang tinggi cenderung memiliki akses lebih luas ke pasar global, yang berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, investasi asing langsung (FDI), dan daya saing industri domestik (Fitriani et al., 2021). Namun, keterbukaan perdagangan juga menghadirkan tantangan, terutama bagi negara-negara dengan sektor industri yang masih berkembang, di mana persaingan global dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik (Gunawan et al., 2021).

Terakhir, jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar mencerminkan likuiditas dalam sistem keuangan dan dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, serta suku bunga (Ambarwati et al., 2021). Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, daya beli masyarakat cenderung naik, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, jika jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka dapat memicu inflasi yang lebih tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2021).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023?

2. Bagaimana pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023.
4. Menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023.
5. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota APEC dalam periode 2019-2023.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga keuangan di negara-negara APEC dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif, khususnya dalam menghadapi inflasi dan mengelola pertumbuhan ekonomi.

##### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan APEC, serta memberikan wawasan tambahan bagi penelitian lanjutan di bidang ekonomi makro dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di negara-negara anggota APEC untuk merancang kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dan masalah apa yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, teori-teori serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara APEC akan dibahas. Bab ini mencakup landasan teori tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh antara keduanya, dan kerangka pemikiran yang akan dimuat dan menjadi sandaran dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, pendekatan, metode, dan prosedur penelitian yang digunakan akan dijelaskan, mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta populasi dan sampel. Gambaran mengenai bagaimana penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan juga akan disajikan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data yang telah dilakukan akan disajikan. Pembahasan mencakup interpretasi hasil serta perbandingannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Bab ini disusun dengan tujuan agar pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara APEC dapat diperoleh.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, kebijakan publik, atau praktik ekonomi di negara-negara APEC. Bab ini merangkum temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis.